

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PADA REHABILITASI SOSIAL
DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI UPT. PPRSA INANG MATUTU
MAKASSAR)**

Destiyana Sumala Sartio¹, Muh. Idris DP², Wahyu Nurdiansyah N³

^{1,2,3}Politiknik STIA LAN Makassar

e-mail: destiyanasartio@gmail.com dpidris@gmail.com
wnurdiansyah28@stialanmakassar.ac.id

ABSTRAK

Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penyimpangan perilaku akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, mental, serta sosial. Di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah anak terlantar masih tinggi, yaitu mencapai 19.240 anak, dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Takalar. Fenomena ini juga tampak di Kota Makassar melalui keberadaan anak jalanan, pengemis, dan pengamen, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi anak terlantar serta mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial di daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Sosial, pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT), pekerja sosial, serta orang tua atau wali anak penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial di UPT PPRSA Inang Matutu cukup efektif dalam meningkatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Anak-anak menerima layanan pemenuhan kebutuhan dasar, terapi, bimbingan sosial, dan pengembangan karakter melalui kegiatan terstruktur. Meskipun demikian, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas (terutama ketiadaan asrama), berkurangnya alokasi anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak serta tumbuh kembang optimal anak terlantar di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Efektivitas Program, Rehabilitasi Sosial, Anak Terlantar*

ABSTRACT

Abandoned children are a vulnerable group at risk of violence, exploitation, and behavioral deviation due to unmet basic physical, mental, and social needs. In South Sulawesi Province, the number of abandoned children remains high, reaching 19,240, with the highest distribution in Takalar Regency. This phenomenon is also evident in Makassar City through the presence of street children, beggars, and buskers, as well as the increasing number of cases of violence against children. This study aims to analyze the conditions of abandoned children and evaluate the effectiveness of social rehabilitation programs in the area. This is a descriptive qualitative study, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Informants included Social Service officials, Technical Implementation Unit (UPT) managers, social workers, and parents or guardians of beneficiary children. The results indicate that the social rehabilitation program at the UPT PPRSA Inang Matutu is quite effective in improving children's psychological, social, and educational aspects. Children receive services that fulfill their basic needs, therapy, social guidance, and character development through structured activities. However, the program's effectiveness remains hampered by limited facilities (particularly the lack of dormitories), reduced budget allocation, a shortage of professional staff, and low community participation. Therefore, a more comprehensive and sustainable

management strategy is needed to ensure the fulfillment of the rights and optimal development of neglected children in South Sulawesi.

Keywords: Program Effectiveness, Social Rehabilitation, Neglected Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset paling berharga yang dimiliki oleh sebuah negara, memegang peranan krusial sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Sebagai tunas bangsa, setiap anak sejatinya memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir untuk memperoleh perlindungan menyeluruh, kasih sayang yang tulus, akses pendidikan yang layak, serta kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertumbuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik semata, melainkan juga meliputi kematangan *mental* dan kemampuan *social* yang sehat (Murni & Djulaeka, 2019; Yosada & Kurniati, 2019). Namun, realitas yang terjadi di lapangan sering kali berbanding terbalik dengan idealisme tersebut, di mana tidak semua anak beruntung dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Salah satu fenomena memprihatinkan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan masyarakat adalah tingginya angka anak terlantar. Anak terlantar didefinisikan sebagai mereka yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, yang diakibatkan oleh kelalaian, ketidakmampuan, atau kesengajaan orang tua dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan, sehingga negara harus hadir untuk menjamin kehidupan mereka (Amartya & Sadnyini, 2024; Rinaldi et al., 2022).

Permasalahan anak terlantar bukan sekadar isu domestik keluarga, melainkan telah berkembang menjadi persoalan *social* yang kompleks dengan dampak jangka panjang yang serius terhadap indeks pembangunan manusia. Anak-anak yang hidup dalam kondisi keterlantaran sangat rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, yang pada akhirnya memicu penyimpangan perilaku akibat minimnya bimbingan moral. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi yang tepat, mereka berpotensi tumbuh menjadi generasi yang tidak produktif dan menjadi beban bagi negara. Data dari lembaga internasional dan dinas terkait menunjukkan bahwa jutaan anak di Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang keterlantaran (Lestari et al., 2024). Fenomena ini memiliki dua wajah berbeda; di wilayah pedesaan, keterlantaran sering kali tersembunyi di balik kemiskinan struktural keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak. Sementara itu, di wilayah perkotaan, masalah ini tervisualisasi secara nyata melalui keberadaan anak jalanan yang terpaksa bekerja keras atau mengemis demi menyambung hidup di tengah kerasnya persaingan kota metropolitan (Lashari et al., 2023; Rempe et al., 2023).

Di Kota Makassar dan sekitarnya, manifestasi dari masalah keterlantaran ini semakin mudah ditemui dan kian meresahkan. Pemandangan anak-anak usia sekolah, bahkan balita di bawah lima tahun, yang berkeliaran di persimpangan lampu lalu lintas menjadi fenomena yang lazim namun menyayat hati. Mereka hadir sebagai pengamen, pengemis, atau penjaja tisu di tengah terik matahari dan polusi kendaraan. Kehadiran mereka di ruang publik, selain membahayakan keselamatan diri sendiri, juga sering kali memicu gesekan *social* dan memperburuk ketertiban umum serta kelancaran lalu lintas. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam perlindungan anak, di mana jalanan dianggap sebagai rumah kedua bagi mereka. Kerentanan mereka terhadap kecelakaan lalu lintas dan pengaruh lingkungan yang negatif menjadi ancaman nyata. Situasi ini menuntut perhatian lebih dari sekadar rasa iba, melainkan tindakan nyata untuk mengembalikan mereka ke lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya, jauh dari bahaya jalanan yang mengancam masa depan mereka setiap detik.

Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi fenomena ini. Berbagai instrumen kebijakan publik (*public policy*) telah dirumuskan, termasuk penerbitan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Regulasi tersebut secara eksplisit mengamankan tindakan preventif atau pencegahan agar jumlah anak terlantar tidak semakin meluas dan kompleksitas masalahnya dapat ditekan. Namun, terdapat kesenjangan yang lebar antara regulasi yang tertulis di atas kertas dengan efektivitas implementasi di lapangan. Upaya penertiban melalui operasi yustisi yang kerap dilakukan oleh dinas terkait, meskipun berhasil menjaring sejumlah anak, tampaknya belum mampu menyentuh akar permasalahan secara fundamental. Jumlah anak yang kembali ke jalanan tetap tinggi, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan mungkin masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya solutif dalam jangka panjang. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami mengapa kebijakan yang ada belum mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi populasi anak terlantar di perkotaan.

Selain masalah keterlantaran ekonomi, anak-anak di wilayah ini juga menghadapi ancaman serius berupa tingginya angka kekerasan. Data statistik menunjukkan ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi setiap tahunnya, dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Faktor pemicu kekerasan ini sangat beragam, mulai dari himpitan ekonomi yang memicu stres pada orang tua, pola pengasuhan (*parenting*) yang keliru, hingga ketidaksiapan psikologis dalam membina rumah tangga. Kasus-kasus viral mengenai penganiayaan balita dan kekerasan antar sesama anak di bawah umur menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ekosistem perlindungan anak saat ini. Ketika pelaku kekerasan juga masih berstatus anak-anak, hal ini menandakan adanya rantai kekerasan yang tidak terputus dan kegagalan dalam pendidikan karakter. Fenomena ini menegaskan bahwa intervensi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi sinergis dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak (Adawiah, 2019; Nurjito & Supardal, 2025; Prasetyawati et al., 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, penyelesaian masalah anak terlantar memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Administrasi publik bukan sekadar pelaksanaan tugas pemerintahan, melainkan kombinasi kompleks antara teori dan praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang diambil pemerintah merupakan pilihan sadar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan umum. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya program, tetapi dari tingkat efektivitasnya. Efektivitas berbeda dengan efisiensi; jika efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang hemat, maka efektivitas menekankan pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sebuah program rehabilitasi sosial dikatakan efektif apabila mampu membawa perubahan positif yang nyata bagi sasaran program, yakni anak-anak terlantar, sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas menjadi instrumen vital untuk menilai keberhasilan intervensi pemerintah dalam menangani masalah sosial ini.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan dan kesenjangan antara kebijakan dengan realitas di lapangan tersebut, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis mendalam mengenai kinerja program pemerintah. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis efektivitas program rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, dengan mengambil studi kasus spesifik pada UPT PPRSA Inang Matutu di Makassar. Penelitian ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) dengan menyoroti secara spesifik bagaimana sebuah lembaga rehabilitasi milik pemerintah beroperasi dalam memulihkan kondisi fisik, *mental*, dan *social* anak binaannya.

Tujuan utamanya adalah untuk membedah sejauh mana program yang dijalankan telah memenuhi indikator keberhasilan dan memberikan dampak positif bagi pemulihan anak terlantar. Melalui kajian ini, diharapkan dapat lahir rekomendasi strategis yang konkret bagi pengembangan kebijakan di masa depan, sehingga upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pelayanan rehabilitasi yang humanis dan transformatif bagi masa depan anak-anak Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam dan komprehensif mengenai tingkat efektivitas serta dinamika implementasi program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan studi kasus spesifik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPRSA Inang Matutu di Makassar. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam membedah fenomena sosial yang kompleks, di mana peneliti berupaya memahami makna di balik data yang dikumpulkan langsung dari lapangan (*primary data*). Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui serangkaian teknik yang sistematis dan terstruktur, meliputi observasi partisipatif untuk mengamati interaksi dan kondisi nyata di panti, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, serta dokumentasi visual dan administratif. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode wawancara jarak jauh melalui telepon untuk menjangkau informan yang memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu, guna memastikan kelengkapan data yang diperoleh tetap terjaga validitasnya.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder untuk memperkuat analisis. Data primer diperoleh langsung dari interaksi dengan subjek penelitian yang terdiri dari para pemangku kepentingan utama, seperti pejabat Dinas Sosial, pengelola UPT, pekerja sosial profesional, serta orang tua atau wali dari anak penerima manfaat program. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* untuk memastikan bahwa narasumber memiliki kapasitas dan pengetahuan yang relevan dengan fokus studi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, telaah dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga, dan arsip data statistik anak terlantar yang tersedia. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memverifikasi keakuratan informasi. Analisis ini tidak hanya berhenti pada deskripsi permukaan, tetapi menggali faktor-faktor determinan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif mengenai efektivitas rehabilitasi sosial yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dinamika dan Tantangan Metodologis dalam Pengumpulan Data Lapangan

Selama proses penelitian mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial di UPT PPRSA Inang Matutu, peneliti menghadapi sejumlah kendala struktural dan psikologis yang cukup kompleks. Tantangan utama berkaitan dengan aksesibilitas data administratif yang bersifat rahasia, mengingat dokumen-dokumen kunci seperti laporan perkembangan anak dan data penerima manfaat mengandung informasi pribadi yang sensitif. Hal ini menyebabkan birokrasi perizinan menjadi sangat berlapis, mulai dari tingkat unit pelaksana teknis hingga ke Dinas Sosial Provinsi, yang secara signifikan memperlambat alur pengumpulan data sekunder. Selain hambatan administratif, peneliti juga menemui kesulitan substansial dalam menggali informasi dari informan utama, yaitu anak-anak terlantar. Latar belakang traumatis dan usia

yang sangat belia membuat subjek penelitian cenderung tertutup, memiliki keterbatasan verbal, dan sulit mempercayai orang baru. Kondisi ini menuntut peneliti untuk menerapkan pendekatan psikologis yang ekstra hati-hati dan memakan waktu lama demi membangun *rapport* yang memadai agar data yang diperoleh tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, tantangan validitas data muncul dari adanya potensi bias informasi yang disampaikan oleh pihak internal pengelola lembaga. Terdapat kecenderungan dari pegawai atau pengelola untuk memberikan respon yang bersifat normatif dan defensif guna menjaga reputasi institusi, sehingga menutup-nutupi kekurangan atau kegagalan program yang sebenarnya terjadi di lapangan. Situasi ini mengharuskan peneliti melakukan upaya triangulasi data yang ketat dengan membandingkan pernyataan pengelola, orang tua, dan pihak eksternal lainnya untuk mendapatkan gambaran objektif. Kendala ini diperberat oleh faktor logistik dan manajemen waktu, di mana jadwal operasional panti yang padat sering kali tidak sinkron dengan ketersediaan waktu informan lain seperti psikolog atau pekerja sosial. Kompleksitas penjadwalan ini, ditambah dengan mobilitas fisik ke lokasi penelitian yang membutuhkan sumber daya ekstra, menjadi variabel penghambat yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaan penelitian secara keseluruhan dalam memotret realitas program rehabilitasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Assessment di UPT PPRSA Inang Matutu

2. Dualisme Ketepatan Sasaran: Antara Mandat Operasional dan Yuridis

Analisis terhadap indikator ketepatan sasaran program memperlihatkan adanya fenomena dualisme yang menarik antara efektivitas operasional dan jangkauan yuridis. Secara operasional, program ini terbukti sangat presisi dalam menjangkau kelompok sasaran spesifik, yakni anak usia 2 hingga 5 tahun yang mengalami kerentanan pengasuhan namun masih memiliki dukungan keluarga. Mekanisme asesmen yang diterapkan berjalan sangat sistematis dan berjenjang, dimulai dari skrining awal oleh pekerja sosial di tingkat UPT, validasi lapangan, hingga penetapan keputusan resmi oleh Dinas Sosial Provinsi. Ketepatan ini dikonfirmasi oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa anak-anak yang diterima memang berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki hambatan tumbuh kembang spesifik. Proses seleksi yang ketat, yang melibatkan verifikasi dokumen kependudukan dan kondisi ekonomi, berhasil memastikan bahwa intervensi negara benar-benar jatuh kepada mereka yang paling membutuhkan layanan pengasuhan alternatif non-residensial (*day care*) sesuai dengan kapasitas lembaga yang tersedia.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif mandat hukum yang lebih luas, program ini dinilai belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh spektrum definisi anak terlantar. Terdapat kesenjangan (*gap*) layanan di mana program ini belum mampu mengakomodasi anak-anak terlantar yang membutuhkan pengasuhan residensial penuh atau sistem panti asuhan, karena syarat utamanya mengharuskan adanya keluarga yang bertanggung jawab untuk pengasuhan malam hari. Meskipun demikian, bagi kelompok sasaran yang berhasil

dijangkau, intervensi yang diberikan sangat relevan. Data wawancara dengan orang tua mengonfirmasi bahwa mereka merasa terbantu karena anak-anak mendapatkan stimulasi motorik dan kognitif yang sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini sangat efektif sebagai model intervensi dini berbasis keluarga untuk mencegah penelantaran lebih lanjut, namun masih memiliki keterbatasan dalam menangani kasus keterlantaran total yang tidak memiliki basis keluarga sama sekali, yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab negara.

3. Transformasi Strategi Sosialisasi Melalui Inovasi Digital dan Kolaborasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT PPRSA Inang Matutu telah berhasil melakukan transformasi dalam strategi komunikasi publik melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peluncuran inovasi "Manajemen Layanan Satu Pintu" atau yang dikenal dengan "Manjain Si Imut" menjadi bukti konkret upaya lembaga dalam mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai portal administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang efektif. Penggunaan media sosial secara aktif untuk mendokumentasikan kegiatan harian, standar operasional prosedur pelayanan, hingga menu gizi anak, memberikan transparansi yang membangun kepercayaan publik. Respon positif dari lembaga internasional seperti UNICEF terhadap inovasi ini menjadi validasi eksternal bahwa strategi sosialisasi yang dijalankan telah memenuhi standar kualitas yang baik. Digitalisasi layanan ini berhasil memangkas jarak birokrasi sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.

Selain mengandalkan platform digital, efektivitas sosialisasi juga didorong oleh kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat akar rumput. Kemitraan dengan Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan kader posyandu terbukti menjadi saluran komunikasi yang paling ampuh untuk menjangkau keluarga sasaran secara *door-to-door*. Pelibatan institusi pendidikan tinggi dalam kegiatan penguatan kapasitas dan penyuluhan *parenting skill* turut memperluas jangkauan sosialisasi ke ranah akademis dan profesional. Kunjungan rutin dari tokoh-tokoh publik daerah yang didokumentasikan sebagai bukti sekunder visual semakin memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Sinergi antara kampanye digital dan pendekatan personal melalui tokoh masyarakat ini menciptakan ekosistem sosialisasi yang komprehensif. Hasilnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi lembaga meningkat, terlihat dari antusiasme pendaftaran dan keterbukaan orang tua dalam melaporkan kondisi anak mereka yang memerlukan intervensi khusus.

4. Capaian Rehabilitasi: Peningkatan Deteksi Dini dan Kemandirian Anak

Evaluasi terhadap pencapaian tujuan program menunjukkan tren keberhasilan yang signifikan dalam aspek pemulihan fungsi sosial dan perkembangan anak. Data statistik periode terbaru mencatat adanya peningkatan jumlah kasus yang terlayani, khususnya pada kategori kerentanan pengasuhan dan kemiskinan. Peningkatan angka ini tidak semata-mata dimaknai sebagai memburuknya kondisi sosial masyarakat, melainkan indikasi keberhasilan sistem deteksi dini dan rujukan yang berjalan efektif. Lebih impresif lagi, terdapat penurunan drastis pada kasus *speech delay* atau keterlambatan bicara pada anak-anak yang telah menjalani program. Penurunan angka kasus gangguan bicara ini menjadi bukti empiris bahwa intervensi terapi wicara dan stimulasi kognitif yang diberikan selama masa rehabilitasi memberikan dampak penyembuhan yang nyata. Program ini terbukti mampu mengoreksi hambatan perkembangan sejak usia dini, sehingga mencegah potensi kecacatan permanen atau hambatan sosial yang lebih berat di masa depan anak.

Di samping capaian klinis, dampak kualitatif program terlihat jelas pada peningkatan kemandirian dan kesiapan sekolah anak penerima manfaat. Tujuan jangka panjang untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar tercapai dengan baik, terbukti dari banyaknya alumni program yang berhasil beradaptasi di sekolah umum dengan kondisi mental dan fisik yang prima. Wawancara dengan orang tua dan pengelola mengungkapkan bahwa anak-anak menunjukkan perubahan perilaku positif yang konsisten, mulai dari kemampuan makan sendiri, kedisiplinan, keberanian berinteraksi sosial, hingga kemampuan komunikasi yang lebih lancar. Melalui evaluasi perkembangan individu yang tercatat rapi, terlihat bahwa program ini tidak hanya sekadar tempat penitipan anak, melainkan pusat rehabilitasi yang menjalankan fungsi terapeutik dan edukatif secara simultan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa intervensi sosial yang terstruktur mampu memutus mata rantai keterlantaran dan menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan siap bersaing.

Pembahasan

Proses penelitian mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial di UPT PPRSA Inang Matutu menyingkap kompleksitas metodologis yang signifikan, terutama terkait aksesibilitas data pada kelompok rentan. Peneliti menghadapi kendala struktural berupa birokrasi perizinan berjenjang yang ketat untuk mengakses dokumen administratif yang bersifat rahasia, mengingat data anak terlantar mengandung informasi sensitif yang dilindungi undang-undang. Selain hambatan administratif, tantangan psikologis muncul dalam proses pengumpulan data primer dari anak-anak sebagai subjek utama. Latar belakang traumatis dan usia yang sangat belia menyebabkan subjek cenderung tertutup dan memiliki keterbatasan verbal, menuntut peneliti untuk menerapkan pendekatan *rapport* yang intensif dan memakan waktu. Dinamika ini menegaskan bahwa penelitian pada ranah kesejahteraan sosial anak tidak hanya membutuhkan ketajaman analitis, tetapi juga kepekaan etis dan psikologis yang tinggi untuk memastikan data yang diperoleh tetap valid tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak (Sari et al., 2025).

Validitas data dalam penelitian ini juga dihadapkan pada tantangan bias institusional, di mana terdapat kecenderungan dari pihak pengelola lembaga untuk memberikan respon yang normatif dan defensif. Upaya menjaga reputasi institusi sering kali membuat informan internal menutupi kekurangan program, yang berpotensi mendistorsi gambaran objektif efektivitas rehabilitasi. Untuk memitigasi risiko ini, triangulasi data menjadi instrumen krusial dengan membandingkan perspektif pengelola, orang tua, dan pengamatan langsung di lapangan. Kendala logistik dan ketidaksinkronan jadwal antara operasional panti yang padat dengan ketersediaan waktu informan ahli seperti psikolog turut memperumit proses validasi. Oleh karena itu, analisis efektivitas program dalam penelitian ini disusun dengan sangat hati-hati, menempatkan temuan lapangan dalam konteks keterbatasan tersebut untuk menyajikan potret realitas yang komprehensif mengenai kinerja layanan rehabilitasi sosial (Aridho & Nainggolan, 2025; Dinardo, 2019; Nisa & Pangestuti, 2025).

Analisis terhadap ketepatan sasaran program memperlihatkan adanya dualisme antara efektivitas operasional dan mandat yuridis. Secara operasional, program ini terbukti sangat presisi dalam menjangkau kelompok sasaran spesifik, yakni anak usia 2 hingga 5 tahun dari keluarga kurang mampu yang mengalami hambatan tumbuh kembang. Mekanisme asesmen bertingkat, mulai dari skrining pekerja sosial hingga validasi Dinas Sosial Provinsi, berhasil memastikan bahwa intervensi negara jatuh kepada mereka yang paling membutuhkan layanan pengasuhan alternatif non-residensial. Data lapangan mengonfirmasi bahwa penerima manfaat memiliki profil kerentanan yang sesuai dengan kriteria teknis lembaga, seperti kemiskinan dan kebutuhan terapi khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem seleksi administratif dan verifikasi faktual di lapangan telah berjalan sinergis untuk meminimalisir kesalahan penargetan atau *inclusion error* dalam distribusi layanan sosial.

Namun, tinjauan dari perspektif mandat hukum mengungkapkan adanya kesenjangan layanan atau *service gap* yang menjadi keterbatasan utama program. Program ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi spektrum luas definisi anak terlantar, khususnya mereka yang membutuhkan pengasuhan residensial penuh atau sistem panti asuhan total karena ketiadaan keluarga sama sekali (Jailani et al., 2025; Sari et al., 2025). Persyaratan adanya keluarga penanggung jawab untuk pengasuhan malam hari menjadikan model *day care* ini tidak relevan bagi kasus keterlantaran mutlak. Sebagaimana ditegaskan dalam teori ketepatan sasaran oleh (Onayemi & Hapunda, 2023; Zulaiha & Fauziah, 2021), efektivitas program diukur dari jangkauannya terhadap seluruh populasi yang membutuhkan. Dalam konteks ini, UPT PPRSA Inang Matutu efektif sebagai model intervensi dini berbasis keluarga, namun memiliki limitasi struktural dalam menangani kasus anak yang benar-benar sebatang kara, yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab sistem rehabilitasi negara.

Dalam aspek sosialisasi program, UPT PPRSA Inang Matutu menunjukkan transformasi strategi komunikasi yang adaptif terhadap era digital melalui inovasi "Manajemen Layanan Satu Pintu" atau "Manjain Si Imut". Inovasi ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik yang transparan. Pemanfaatan media sosial secara aktif untuk mendokumentasikan standar pelayanan dan kegiatan harian anak memberikan akses informasi yang luas dan membangun kepercayaan masyarakat. Validasi eksternal dari lembaga internasional seperti UNICEF terhadap inovasi ini menegaskan bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan telah memenuhi standar kualitas global. Digitalisasi layanan terbukti efektif memangkas jarak antara penyedia layanan dan masyarakat, sehingga keluarga yang membutuhkan intervensi dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa hambatan administratif yang berbelit, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program (Alif et al., 2025; Prasiska & Yaqin, 2023).

Efektivitas sosialisasi program juga sangat didukung oleh kolaborasi strategis lintas sektoral yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat akar rumput hingga akademisi. Kemitraan dengan Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD terbukti menjadi saluran komunikasi paling ampuh untuk menjangkau keluarga sasaran secara *door-to-door*, mengingat kedekatan emosional kader dengan masyarakat. Pelibatan institusi pendidikan tinggi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyuluhan *parenting skill* turut memperluas legitimasi program. Sinergi ini menciptakan ekosistem sosialisasi yang komprehensif, di mana informasi tidak hanya menyebar secara vertikal melalui kanal resmi, tetapi juga secara horizontal melalui tokoh masyarakat. Hal ini berdampak pada tingginya kesadaran publik terhadap fungsi lembaga, yang terlihat dari antusiasme pendaftaran dan keterbukaan orang tua dalam melaporkan kondisi anak yang memerlukan penanganan khusus (Fahrudin & Halwati, 2023; Ru'iyah et al., 2024).

Evaluasi terhadap capaian tujuan program menunjukkan keberhasilan signifikan dalam aspek pemulihan fungsi sosial dan perkembangan anak. Penurunan drastis pada kasus *speech delay* menjadi bukti empiris efektivitas intervensi terapi wicara dan stimulasi kognitif yang diberikan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penitipan anak, melainkan sebagai pusat rehabilitasi yang menjalankan fungsi terapeutik dan edukatif secara simultan. Peningkatan jumlah kasus yang terlayani mengindikasikan keberhasilan sistem deteksi dini, sementara testimoni orang tua mengenai peningkatan kemandirian dan kedisiplinan anak mengonfirmasi dampak kualitatif program. Keberhasilan mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar dengan kondisi mental dan fisik yang prima menegaskan bahwa intervensi dini yang terstruktur mampu memutus mata rantai keterlantaran, menciptakan generasi yang lebih berkualitas, dan mengurangi beban masalah sosial di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan hasil dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, ketepatan sasaran program rehabilitasi sosial anak di UPT PPRSA Inang Matutu menunjukkan capaian yang signifikan dalam menjangkau kelompok anak usia dini (2–5 tahun) yang masih memiliki dukungan keluarga namun menghadapi tantangan pengasuhan dan perkembangan. Program ini terbukti efektif dalam aspek operasional, melalui mekanisme asesmen, validasi data, serta kolaborasi lintas lembaga yang memastikan intervensi diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Inovasi seperti “Manajemen Layanan Satu Pintu (Manjain Si Imut)” juga memperkuat efektivitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Namun, jika ditinjau dari mandat hukumnya yang lebih luas, program ini masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau anak terlantar yang memerlukan pengasuhan residensial. Dengan demikian, meskipun telah berhasil dalam tataran implementatif dan pelayanan non-residensial, perlu strategi perluasan jangkauan dan penguatan kapasitas agar ketepatan sasaran program dapat sepenuhnya mencakup seluruh kategori anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan sosial nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2019). Child abuse dan keamanan lingkungan anak dalam menyongsong bonus demografi 2025-2030. *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.13>
- Alif, N., et al. (2025). Implementasi kebijakan electronic government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 233. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4279>
- Amartya, I. G. N. A., & Sadnyini, I. A. (2024). Legal protection for neglected children based on regional regulation of Bali Province. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7311>
- Aridho, A., & Nainggolan, M. (2025). Peran Dinas Sosial dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Medan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 896. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6382>
- Dinardo, D. (2019). Peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi wanita rawan sosial ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Diklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(2), 218. <https://doi.org/10.21831/diklus.v1i2.23872>
- Fahrudin, B. A., & Halwati, U. (2023). Implementasi fungsi pokok manajemen humas pada yayasan pendidikan. *Jurnal Isema Islamic Educational Management*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.15575/isema.v8i1.25456>
- Jailani, J., et al. (2025). Analisis pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>
- Lashari, A., et al. (2023). Causes associated with the growing number of street children in urban cities of Indonesia. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 382. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.276>
- Lestari, E., et al. (2024). Stunting and its association with education and cognitive outcomes in adulthood: A longitudinal study in Indonesia. *PLoS ONE*, 19(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295380>
- Murni, M., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan atas hak anak yang terabaikan (Studi kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya). *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i1.5179>

- Nisa, A. K., & Pangestuti, R. (2025). Kemandirian instrumental activity daily living (IADL) penyintas skizofrenia pekerja job club. *PAEDAGOGY Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(3), 943. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v5i3.6771>
- Nurjito, A. S., & Supardal, S. (2025). Strategi penanganan anak tidak sekolah (P-ATS) di Kabupaten Magelang: Meningkatkan akses dan kesadaran pendidikan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1006. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6961>
- Onayemi, O. M., & Hapunda, G. (2023). Socio-ecological drivers of vulnerabilities of children living within orphan homes and the implications for their nurturance care. *Frontiers in Public Health*, 11, 1203510. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1203510>
- Prasetyawati, S. E., et al. (2024). Regional government policy in the implementation of child-friendly city: An analysis of Way Kanan District. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(1), 142. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.4283>
- Prasiska, D. I., & Yaqin, M. J. A. (2023). Digital health intervention of healthy Indonesia program with family approach: Does it work? *Jurnal PROMKES*, 11, 1. <https://doi.org/10.20473/jpk.v11.i1si.2023.1-8>
- Rempe, O., et al. (2023). Meninjau tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: Studi kasus pada anak-anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(5), 448. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i05.1761>
- Rinaldi, K., et al. (2022). Pendekatan attachment sebagai salah satu upaya pencegahan juvenile delinquency. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 163. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2612
- Ru'iya, S., et al. (2024). Enhancing journalistic skills among teachers in Sleman Muhammadiyah Regional Leadership (PDM). *Community Empowerment*, 9(4), 702. <https://doi.org/10.31603/ce.11126>
- Sari, F. H., et al. (2025). Urgensi kebijakan pemerintah dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual pada siswa sekolah dasar. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 821. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.7323>
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Zulaiha, D., & Fauziah, P. (2021). Kualitas pengasuhan untuk dukungan pendidikan sekolah dasar kelas bawah di panti asuhan. *Cakrawala Dini Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.17509/cd.v12i1.25766>